



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM
2. Jabatan : KETUA DPRD
3. NHK : 530858

II. DATA HARTA

- | | | |
|--|------------|-----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 26.981.168.000 |
| 1. Tanah Seluas 9.263 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 14.102.918.000 | | |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 2.237 m2/666 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 5.746.650.000 | | |
| 3. Tanah dan Bangunan Seluas 746 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 4.200.000.000 | | |
| 4. Tanah dan Bangunan Seluas 829 m2/206 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 2.065.350.000 | | |
| 5. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 78.750.000 | | |
| 6. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/154 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 787.500.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 381.785.000 |
| 1. MOBIL, TOYOTA RUSH SPORTIVO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 251.285.000 | | |
| 2. MOBIL, TOYOTA HILUX PICK UP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.500.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 872.324.814 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | 60.000.000 |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 275.000.000 |



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 28.570.277.814

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 28.570.277.814

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.